



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan Nomenklatur Jabatan Pelaksana paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang

diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam suatu satuan kerja organisasi pemerintah.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan formal.

BAB II JABATAN PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Jabatan Pelaksana bagi ASN dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan ASN yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Nomenklatur Jabatan Pelaksana.
- (3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:

- a. klerek;
- b. operator; dan
- c. teknisi.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi Pemerintah Daerah untuk :

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. penentuan kelas jabatan;
- c. pengembangan karier;
- d. pengembangan kompetensi;
- e. penilaian kinerja;
- f. penggajian dan tunjangan; dan
- g. pemberhentian.

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah kepada Bupati.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. nomenklatur Jabatan;
 - b. tugas Jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan dan/atau profesi; dan
 - d. kelas jabatan bagi nomenklatur Jabatan yang sudah memiliki kelas Jabatan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan analisis Jabatan dan analisis beban kerja.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 7

- (1) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan struktural atau Jabatan fungsional tertentu, diangkat dalam Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengangkatan ASN dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahan ASN dalam Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Bupati, dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kepegawaian.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Majalengka Nomor 34 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 118 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 34 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 121), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Juli 2025

BUPATI MAJALENGKA

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 1 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MUMON RUKMAN, S.H., M.H.
NIP 19751231 2005011 031



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR NAMA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI
1	2	3
1	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat Daerah
2	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat Daerah
3	Penata Kelola Pemerintahan	Sekretariat Daerah
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat Daerah
5	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah
6	Pengelola Layanan Operasional	Sekretariat Daerah
7	Pengelola Layanan Pengadaan	Sekretariat Daerah
8	Penata Kelola Sistem dan Teknologi informasi	Sekretariat Daerah
9	Pengelola Keprotokolan	Sekretariat Daerah
10	Penata Keprotokolan	Sekretariat Daerah
11	Pengelola Siaran	Sekretariat Daerah
12	Penata Layanan Operasional	Sekretariat Daerah
13	Pengadministrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD
14	Pengelola Keprotokolan	Sekretariat DPRD
15	Penata Keprotokolan	Sekretariat DPRD
16	Penelaah Teknis Kebijakan	Sekretariat DPRD

17	Operator Layanan Operasional	Sekretariat DPRD
18	Pengolah Data dan Informasi	Sekretariat DPRD
19	Penata Layanan Operasional	Sekretariat DPRD
20	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat
21	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat
22	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat
23	Operator Layanan Operasional	Inspektorat
24	Pengelola Layanan Operasional	Inspektorat
25	Penata Layanan Operasional	Inspektorat
26	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan
27	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan
28	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pendidikan
29	Penata Layanan Operasional	Dinas Pendidikan
30	Operator Layanan Operasional	Dinas Pendidikan
31	Operator Layanan Operasional	Dinas Kesehatan
32	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan
33	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Kesehatan
34	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan
35	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan
36	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Kesehatan
37	Pengelola Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
38	Penata Kelola Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

39	Operator Layanan Operasional	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B)
40	Pengadministrasi Perkantoran	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B)
41	Pengolah Data dan Informasi	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B)
42	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B)
43	Pengelola Layanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B)
44	Operator Layanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B)
45	Penata Kelola Layanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Cideres (Kelas B)
46	Operator Layanan Operasional	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C)
47	Pengadministrasi Perkantoran	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C)
48	Pengolah Data dan Informasi	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C)
49	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C)
50	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C)
51	Pengelola Layanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C)
52	Operator Layanan Operasional	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C)
53	Penata Kelola Layanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka (Kelas C)
54	Pengadministrasi Perkantoran	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga (Kelas D)
55	Pengolah Data dan Informasi	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga (Kelas D)
56	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga (Kelas D)
57	Operator Layanan Operasional	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga (Kelas D)
58	Operator Layanan Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Talaga (Kelas D)
59	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
60	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

61	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
62	Fasilitator Pemerintahan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
63	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
64	Penata Layanan Operasional	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
65	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
66	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
67	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
68	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
69	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
70	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
71	Penata Layanan Operasional	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
72	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
73	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
74	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
75	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
76	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
77	Penata Layanan Operasional	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
78	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
79	Operator Layanan Operasional	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

80	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
81	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
82	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
83	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
84	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
85	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
86	Penata Layanan Operasional	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
87	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
88	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
89	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
90	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
91	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
92	Penata Layanan Operasional	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
93	Operator Layanan Operasional	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
94	Pengawas Industri	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
95	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
96	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
97	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
98	Penata Layanan Operasional	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
99	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Sosial
100	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Sosial
101	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Sosial

102	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial
103	Penata Layanan Operasional	Dinas Sosial
104	Operator Layanan Operasional	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
105	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
106	Operator Layanan Operasional	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
107	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
108	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
109	Penata Layanan Operasional	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah
110	Operator Layanan Operasional	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
111	Operator Layanan Operasional	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
112	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
113	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
114	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
115	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
116	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
117	Operator Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
118	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
119	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
120	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
121	Penata Layanan Operasional	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
122	Operator Alat Berat	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
123	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang

124	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
125	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
126	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
127	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
128	Penata Layanan Operasional	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
129	Operator Layanan Operasional	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Pertanahan
130	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pemuda Dan Olahraga
131	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
132	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemuda Dan Olahraga
133	Penata Layanan Operasional	Dinas Pemuda Dan Olahraga
134	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
135	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
136	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
137	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
138	Operator Layanan Operasional	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
139	Penata Pameran	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
140	Fasilitator Perdagangan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
141	Kurator	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
142	Operator Layanan Operasional	Dinas Perhubungan
143	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan
144	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Perhubungan
145	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Perhubungan

146	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perhubungan
147	Penata Layanan Operasional	Dinas Perhubungan
148	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Perhubungan
149	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi Dan Informatika
150	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
151	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Komunikasi Dan Informatika
152	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
153	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
154	Operator Layanan Operasional	Dinas Komunikasi Dan Informatika
155	Pengelola Siaran	Dinas Komunikasi Dan Informatika
156	Jurnalis	Dinas Komunikasi Dan Informatika
157	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup
158	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Lingkungan Hidup
159	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Lingkungan Hidup
160	Operator Layanan Operasional	Dinas Lingkungan Hidup
161	Operator Layanan Operasional	Dinas Lingkungan Hidup
162	Penata Layanan Operasional	Dinas Lingkungan Hidup
163	Operator Layanan Operasional	Dinas Lingkungan Hidup
164	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah
165	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah
166	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah
167	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

168	Pengelola Layanan Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
169	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
170	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
171	Pengolah Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
172	Penata Layanan Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
173	Pengelola Trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
174	Operator Layanan Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
175	Pengolah Data dan Informasi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
176	Pengelola Layanan Operasional	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
177	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
178	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
179	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
180	Penata Layanan Operasional	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
181	Pengolah Data dan Informasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
182	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
183	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
184	Penata Layanan Operasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan
185	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Keuangan Dan Aset Daerah

186	Pengolah Data dan Informasi	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
187	Pengelola Layanan Operasional	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
188	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
189	Penata Layanan Operasional	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
190	Operator Layanan Operasional	Badan Pendapatan Daerah
191	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Pendapatan Daerah
192	Pengelola Layanan Operasional	Badan Pendapatan Daerah
193	Pengolah Data dan Informasi	Badan Pendapatan Daerah
194	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Badan Pendapatan Daerah
195	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pendapatan Daerah
196	Penata Layanan Operasional	Badan Pendapatan Daerah
197	Operator Layanan Operasional	Badan Pendapatan Daerah
198	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
199	Pengolah Data dan Informasi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
200	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
201	Penata Layanan Operasional	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
202	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
203	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
204	Pengolah Data dan Informasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
205	Penata Layanan Operasional	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
206	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Argapura
207	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Argapura

208	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Argapura
209	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Argapura
210	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Banjaran
211	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Banjaran
212	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Banjaran
213	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Banjaran
214	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Bantaruweg
215	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Bantaruweg
216	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Bantaruweg
217	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Bantaruweg
218	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Cigasong
219	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Cigasong
220	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Cigasong
221	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Cigasong
222	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Cigasong
223	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Cigasong
224	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Cicenang
225	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Cicenang
226	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Simpeureum
227	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Simpeureum
228	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Cikijing
229	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Cikijing

230	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Cikijing
231	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Cikijing
232	Operator Layanan Operasional	Kecamatan Cingambul
233	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Cingambul
234	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Cingambul
235	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Cingambul
236	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Cingambul
237	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Dawuan
238	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Dawuan
239	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Dawuan
240	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Dawuan
241	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Jatitujuh
242	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Jatitujuh
243	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Jatitujuh
244	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Jatitujuh
245	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Jatiwangi
246	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Jatiwangi
247	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Jatiwangi
248	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Jatiwangi
249	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Kadipaten
250	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Kadipaten
251	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Kadipaten

252	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Kadipaten
253	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Kasokandel
254	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Kasokandel
255	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Kasokandel
256	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Kasokandel
257	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Kertajati
258	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Kertajati
259	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Kertajati
260	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Kertajati
261	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Lemahsugih
262	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Lemahsugih
263	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Lemahsugih
264	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Lemahsugih
265	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Leuwimunding
266	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Leuwimunding
267	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Leuwimunding
268	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Leuwimunding
269	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Ligung
270	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Ligung
271	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Ligung
272	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Ligung
273	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Maja

274	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Maja
275	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Maja
276	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Maja
277	Operator Layanan Operasional	Kecamatan Majalengka
278	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Majalengka
279	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Majalengka
280	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Majalengka
281	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Majalengka
282	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Majalengka Kulon
283	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Majalengka Kulon
284	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Babakan Jawa
285	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Babakan Jawa
286	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Cicurug
287	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Cicurug
288	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Cijati
289	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Cijati
290	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Cikasarung
291	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Cikasarung
292	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Munjul
293	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Munjul
294	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Sindangkasih
295	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Sindangkasih

296	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Tarikolot
297	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Tarikolot
298	Pengadministrasi Perkantoran	Kelurahan Tonjong
299	Pengolah Data dan Informasi	Kelurahan Tonjong
300	Operator Layanan Operasional	Kecamatan Malausma
301	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Malausma
302	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Malausma
303	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Malausma
304	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Malausma
305	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Palasah
306	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Palasah
307	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Palasah
308	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Palasah
309	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Panyingkiran
310	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Panyingkiran
311	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Panyingkiran
312	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Panyingkiran
313	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Rajagaluh
314	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Rajagaluh
315	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Rajagaluh
316	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Rajagaluh
317	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Sindang

318	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Sindang
319	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Sindang
320	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Sindang
321	Pengelola Umum Operasional	Kecamatan Sindangwangi
322	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Sindangwangi
323	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Sindangwangi
324	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Sindangwangi
325	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Sindangwangi
326	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Sukahaji
327	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Sukahaji
328	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Sukahaji
329	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Sukahaji
330	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Sumberjaya
331	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Sumberjaya
332	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Sumberjaya
333	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Sumberjaya
334	Pengadministrasi Perkantoran	Kecamatan Talaga
335	Pengolah Data dan Informasi	Kecamatan Talaga
336	Penelaah Teknis Kebijakan	Kecamatan Talaga
337	Pengelola Layanan Operasional	Kecamatan Talaga

Salinan sesuai dengan aslinya,

BUPATI MAJALENGKA

ttd

EMAN SUHERMAN

